



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : SR.02.06/C/3914/2022  
Lampiran : satu berkas  
Hal : Pelaksanaan Perluasan Introduksi Imunisasi  
Pneumokokus Konyugasi (PCV)

19 Agustus 2022

Yth. (daftar terlampir)

Pneumonia merupakan penyakit yang sangat endemis dan menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi dan balita di Indonesia sehingga diperlukan upaya untuk memutus rantai penularannya melalui pemberian imunisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/6780/2021 sebagaimana diubah dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/ MENKES/ 779/ 2022 tentang Pemberian Imunisasi Pneumokokus Konyugasi (PCV), imunisasi PCV akan diintroduksi dalam program imunisasi secara nasional mulai Juli 2022.

Sehubungan dengan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang masih berlangsung pada bulan Juli serta mempertimbangkan waktu kedatangan vaksin PCV, maka pelaksanaan perluasan introduksi imunisasi PCV disesuaikan dari bulan Juli 2022 menjadi bulan September 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti hasil pertemuan Workshop Petugas Imunisasi dalam rangka Pelaksanaan Imunisasi Pneumokokus yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 Agustus 2022, mohon Saudara melakukan identifikasi kembali sasaran introduksi imunisasi PCV dan melakukan pengisian evaluasi kesiapan (*readiness assessment*) introduksi imunisasi PCV tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas pada formulir yang terdapat dalam tautan berikut: <https://link.kemkes.go.id/EvaluasiKesiapanIntroduksilmunisasiPCV> sebelum tanggal 5 September 2022.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal P2P,



**Dr.dr. MAXI REIN RONDONUWU, DHSM.MARS**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Ketua ITAGI
4. Ketua Komnas PP KIPI

5.

Lampiran 1

Nomor : SR.02.06/C/3914/2022

Tanggal : 19 Agustus 2022

**Yth.**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
20. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
27. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
28. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Direktur Jenderal P2P,



**Dr.dr. MAXI REIN RONDONUWU, DHSM.MARS**